



### TINGKAT KEMISKINAN RIAU MARET 2017

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Riau pada Maret 2017 adalah 514,62 ribu jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk.**

- ☑ Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret 2017 sebesar 514,62 ribu jiwa (7,78 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah 515,40 ribu jiwa (7,98 persen), penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak 0,78 ribu jiwa.
- ☑ Selama periode Maret 2016 - Maret 2017, penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 16,92 ribu jiwa, sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 16,13 ribu jiwa.
- ☑ Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 479,83 ribu jiwa pada bulan Maret 2012 menjadi 514,62 ribu jiwa pada bulan Maret 2017. Namun demikian terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 8,82 persen pada tahun 2012 menjadi 7,78 persen pada bulan Maret 2017.
- ☑ Distribusi persentase penduduk miskin di Riau pada Bulan Maret 2016 di perdesaan sebesar 68,48 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 31,52 persen. Distribusi ini sedikit mengalami pergeseran pada tahun 2017, dimana persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan menjadi 65,30 persen sedangkan perkotaan mengalami kenaikan menjadi 34,70 persen.
- ☑ Selama periode Maret 2016 - Maret 2017, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 7,16 persen yaitu dari Rp 426.001,- per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 456.493,- per kapita per bulan pada Maret 2017. Peran komoditas makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK pada Maret 2017 mencapai 73,59 persen atau sebesar Rp 335,922,-, sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah 26,41 persen atau sebesar Rp 120,571,-.
- ☑ Pada periode Maret 2016 - Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) mengalami kenaikan. Pada periode Maret 2016,  $P_1$  sebesar 1,359 turun menjadi 1,322 pada Maret 2017, dan  $P_2$  nya pada Maret 2016 sebesar 0,337 naik menjadi 0,356 pada Maret 2017. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan sedangkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat.

#### 1. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI RIAU, MARET 2012 – MARET 2017

Jumlah penduduk miskin di Riau pada periode Maret 2012- Maret 2017 menunjukkan kecenderungan meningkat, sedangkan persentase penduduk miskin di Riau menunjukkan kecenderungan fluktuatif, dimana jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 34,79 ribu jiwa yaitu dari 479,83 ribu jiwa pada tahun 2012 menjadi 514,62 ribu jiwa pada tahun

2017. Namun pada periode yang sama persentase penduduk miskin menurun dari 8,22 persen menjadi 7,78 persen.

Selama periode Maret 2012 – Maret 2017 Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat dari 147,17 ribu jiwa pada Maret 2012 menjadi 178,58 ribu jiwa pada Maret 2017. Demikian juga, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 332,66 ribu jiwa pada tahun 2012 menjadi 336,03 ribu jiwa pada Maret 2017. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin dari periode Maret 2012 ke Maret 2017. Namun pada periode yang sama, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,93 poin.

**Tabel 1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau**  
**menurut Daerah, 2012-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Maret 2012	147,17	332,66	479,83	6,43	9,36	8,22
Maret 2013	144,24	318,43	462,67	6,15	8,73	7,72
Maret 2014	166,36	333,52	499,88	6,90	8,92	8,12
Maret 2015	166,45	364,94	531,39	6,79	9,46	8,42
Maret 2016	162,45	352,95	515,40	6,40	9,00	7,98
Maret 2017	178,58	336,03	514,62	6,79	8,43	7,78

Sumber: BPS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

## 2. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN RIAU MARET 2016 - MARET 2017

Jumlah penduduk miskin di Riau pada bulan Maret 2017 sebesar 514,62 ribu atau 7,78 persen dari jumlah penduduk Riau. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 0,78 ribu jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah 515,40 ribu atau 7,98 persen dari jumlah penduduk Riau.

**Tabel 2**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
<b><u>Perkotaan</u></b>					
Maret 2016	292.026	134.320	426.346	162,45	6,40
Maret 2017	318.174	145.074	463.248	178,58	6,79
<b><u>Perdesaan</u></b>					
Maret 2016	326.262	99.515	425.777	352,95	9,00
Maret 2017	346.208	104.373	450.581	336,03	8,43
<b><u>Kota+Desa</u></b>					
Maret 2016	312.352	113.648	426.001	515,40	7,98
Maret 2017	335.922	120.571	456.493	514,62	7,78

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas Maret 2016 dan Maret 2017

Jumlah penduduk miskin di Riau yang tinggal di daerah perdesaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perkotaan pada Maret 2017 mengalami kenaikan, dimana pada daerah perdesaan jumlah penduduk miskinnya mencapai 336,03 ribu penduduk, turun sebesar 16,92 ribu penduduk atau sekitar 4,80 persen jika dibandingkan dengan Maret 2016 yaitu 352,95 ribu penduduk. Sedangkan Jumlah penduduk miskin di Riau yang tinggal di daerah perkotaan Maret 2017 sebesar 178,58 ribu jiwa, mengalami kenaikan sebesar 16,13 ribu jiwa atau sebesar 9,93 persen jika dibandingkan dengan Maret 2016 yaitu 162,45 ribu jiwa.

### **3. PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN (GK) MARET 2016 - MARET 2017**

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh GK, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Semakin tinggi GK, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Selama Maret 2016 - Maret 2017, GK naik sebesar 7,16 persen, yaitu dari Rp 426.001,- per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 456.493,- per kapita per bulan pada Maret 2017. Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Peranan GKM terhadap GK pada Maret 2017 mencapai 73,59 persen sedangkan peranan GKNM terhadap GK adalah 26,41 persen.

### **4. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN**

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2016 - Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,359 pada keadaan Maret 2016 menjadi 1,322 pada keadaan Maret 2017. Namun demikian Indeks Keparahannya Kemiskinan naik dari 0,337 menjadi 0,356 pada periode yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Sedangkan peningkatan nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin mengalami kenaikan.

Jika dibandingkan antara daerah perdesaan dengan perkotaan, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) di perdesaan mengalami penurunan dari 1,633 pada Maret 2016 menjadi 1,317 pada Maret 2017, namun di perkotaan mengalami peningkatan yaitu dari 0,934 pada Maret 2016 menjadi 1,331 pada Maret 2017. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan semakin mendekati ke garis kemiskinan. Sebaliknya di perkotaan, rata-rata pengeluaran penduduk miskinnya semakin menjauhi garis kemiskinan secara nyata.

Indeks Keparahannya Kemiskinan ( $P_2$ ) di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 0,424 pada Maret 2016 menjadi 0,345 pada Maret 2017, sedangkan di daerah perkotaan Indeks

Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) mengalami peningkatan dari 0,203 pada Maret 2016 menjadi 0,372 pada Maret 2017. Hal ini berarti terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan tetapi terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan.

**Tabel 3**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )  
di Provinsi Riau Menurut Daerah, Maret 2016- Maret 2017**

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<b><u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (<math>P_1</math>)</u></b>			
Maret 2016	0,934	1,633	1,359
Maret 2017	1,331	1,317	1,322
<b><u>Indeks Keparahan Kemiskinan (<math>P_2</math>)</u></b>			
Maret 2016	0,203	0,424	0,337
Maret 2017	0,372	0,345	0,356

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2016 dan Maret 2017

## 5. Perkembangan *Gini Ratio* Maret 2012 – Maret 2017

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai *Gini Rasio* di Riau menunjukkan kecenderungan ketimpangan yang semakin rendah. Nilai *Gini Ratio* Maret 2012 tercatat sebesar 0,404 dan keadaan Maret 2016 sebesar 0,347 serta turun lagi menjadi 0,325 pada Maret 2017.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,353. Angka ini menurun sebesar 0,061 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2012 yang sebesar 0,414. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* Maret 2017 tercatat sebesar 0,289. Angka ini menurun sebesar 0,066 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2012 yang sebesar 0,355.

**Tabel 4**  
***Gini Rasio* di Provinsi Riau Menurut Daerah, Maret 2012- Maret 2017**

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
Maret 2012	0,414	0,355	0,404
Maret 2013	0,398	0,316	0,374
Maret 2014	0,389	0,276	0,353
Maret 2015	0,392	0,328	0,364
Maret 2016	0,369	0,309	0,347
Maret 2017	0,353	0,289	0,325

Sumber: BPS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

## PENJELASAN TEKNIS DAN SUMBER DATA

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Indikator Kemiskinan yang digunakan antara lain : *Headcount Index (P0)* yaitu Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, *Poverty Gap Index (P1)*/Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan, dan *Poverty Severity (P2)*/Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Formula: Foster-Greer-Thorbecke (FGT) formula.
- d. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2016 dan Maret 2017. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditas pokok bukan makanan.